

ARTIKEL

Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Kota Semarang

Oleh :

Sindy Fitria Utami,Dyah Hariani,Dewi Rostyaningsih

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jl. Profesor Haji Sudarto, Sarjana.Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Email: sindysindy39@yahoo.com

GABSTRACT

The convening of a parking levy aims to increase revenue (PAD) and keep order and comfort of the vehicle. These objectives can be achieved through the implementation of effective processes that can be seen from the appropriateness of the policy, the accuracy of implementation, the target precision, accuracy and precision of the process environment.

Parking charges policy implementation process in achieving its objectives can not be separated from the factors that support and hinder. Based on the theory of Edwards III several factors that support and hinder the form of objective / outcome, Communications and Resources

Based on the existing obstacles in the implementation of policies parking fees the city, the authors provide recommendations include: (1) increasing the number of staff accordingly (2) formal socialization to parking attendants so that the information can be the same (3) increase the budget allocation policy (4) add a vehicle to facilitate the mobilization.

Keywords: implementation, parking levies, supporting factors, factors inhibiting

A.PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk menggali potensi kaitannya membiayai pengeluaran daerah khususnya kota Semarang ,dititik beratkan pada selisih pendapatan yang belum dapat mencapai target realisasi. Penerimaan pendapatan mengalami presentase kenaikan dari tahun 2012 semenjak diputusnya kerjasama dengan pihak swasta.Meskipun masih jauh dari target dan yang terakhir adanya pengurangan target pendapatan sebanyak 36,7 % atau sebanyak 2.153.120.000.Pemerintah telah menaikkan presentase pendapatan dengan jumlah lebih dari 50 % akibat diturunkannya target pendapatan.

Kinerja pemerintah dalam mengelola parkir di Kota Semarang masih kurang baik,dimana realisasi pendapatan daerah yang belum pernah sesuai dengan target.Realisasi pendapatan yang mengalami kenaikan ditahun 2013 sebanyak 2.601.911.700 atau sebanyak 44 % tidak bisa memungkiri berhasilnya keputusan pemerintah daerah untuk

mengakhiri kerjasama dengan pihak swasta.Sangat disayangkan dengan keberhasilan ini pemerintah daerah memutuskan untuk mengurangi target realisasi pendapatan padahal jumlah titik parkir selalu mengalami penambahan yang tercatat hingga Desember 2014 sebanyak 1127 titik parkir.

Pembinaan dan pengelolaan perparkiran merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi di daerah.

B. TUJUAN

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk memberikan arah yang tepat dalam proses dan pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan agar penelitian tersebut berjalan sesuai dengan apa yang hendak dicapai. penelitian ini dimaksudkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah daerah terkait retribusi Parkir Kota Semarang dalam

mengendalikan perparkiran di Kota Semarang.

2. Untuk mengetahui Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi retribusi parkir di Kota Semarang.

C. TEORI

Teori yang digunakan adalah:

1. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik menurut Thomas Dye (AG. Suarsono, 2008) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Sedangkan James A. Enderson (AG. Suarsono, 2008) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah.

2. Implementasi Kebijakan

Riant D Nugroho (2003 :158) menyatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. George C. Edwards (Winarno,

2007: 174) menjelaskan bahwa studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, anantara pembentukan kebijakan dan konsekuensi konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin mengalami kegagalan sekaipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat bak. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

D. METODE

1. Desain Penelitian menggunakan tipe Penelitian Kualitatif.
2. Fokus dari penelitian ini adalah Implementasi Retribusi Parkir sehingga lokus atau tempat penelitian tersebut adalah Kota Semarang.

3. Subjek Penelitian adalah Kepala Bidang Perparkiran Dishubkominfo Kota Semarang, Staff, Juru Parkir, Masyarakat.
4. Jenis data adalah Data Primer dan Data Sekunder.
5. Teknik pengumpul data adalah dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka
6. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis taksonomi yaitu dengan melakukan pengamatan dan wawancara terfokus berdasarkan fokus yang sebelumnya dipilih oleh peneliti.

E. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Kota Semarang

Ada banyak faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan, Namun dalam Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan proses, ketepatan lingkungan dan ketepatan target.

1. Ketepatan kebijakan

Tahun 2015 ini akan diadakan revisi kembali mengenai pembenahan kebijakan retribusi parkir supaya bisa menjangkau

manfaat dari banyak kendaraan bermotor di Kota Semarang sebagai pemasukan daerah. Revisi ini bertujuan untuk memperbaiki perda sebelumnya yang belum memuat aturan – aturan baru yang membatasi gerak Dishubkominfo dalam penyelenggaraan parkir.

2. Ketepatan pelaksanaan

Ada tiga poin di aturan struktur dan bagan organisasi di poin ke empat dan lima ,enam serta sebelas yang masih belum dilaksanakan dengan baik yaitu, dengan kenaikan titik parkir realisasinya pun kurang dari 50 %, sarana untuk parkir yang masih kurang seperti rompi untuk juru parkir dan sepeda motor dinas dan mengganti pemberlakuan karcis dengan sistem setoran kepada juru parkir.

3. Ketepatan target

Target retribusi parkir merupakan realisasi pendapatan dan itu tercermin dari titik parkir. Realisasi titik parkir kurang dari 50% berdasarkan data yang dikelola Dishubkominfo

4. Ketepatan lingkungan

Jumlah staf yang banyak dapat tidak secara

otomatis mendorong implementasi yang berhasil. Hal ini disebabkan karena kurangnya ketrampilan-ketrampilan yang dimiliki oleh pegawai untuk melaksanakan tugas dengan baik sehingga tidak terciptanya efisiensi dan efektifitas dalam pencapaian tujuan, tetapi disisi lain juga kekurangan pegawai akan menimbulkan permasalahan yang tidak kalah penting menyangkut implementasi kebijakan yang efektif.

5. Ketepatan proses

Dari tahapan yang ada seperti Pelelangan dan kemudian kerjasama dengan pihak ketiga, terkendala dengan aturan samsat berlangganan yaitu dengan UU LLAJ no 22 tahun 2009 dan Perda no 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, yang selanjutnya di kelola langsung oleh DISHUB.

F. Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, ada beberapa hal yang menjadi kendala maupun hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi

pelayanan Parkir. Hambatan maupun kendala tersebut dapat menjadi penyebab ketidaklancaran pelaksanaan pungutan retribusi. Berikut kendala apa saja yang menjadi penyebab ketidaklancaran pelaksanaan pemungutan retribusi berdasarkan teori Edward III.

Faktor yang mendukung: Implementor dan pedagang sudah tau mengenai retribusi parkir, Adanya rakor dan pertemuan berkala, Adanya keterlibatan instansi lain. Faktor yang menghambat: Juru parkir sulit dikoordinir untuk setoran, Sikap petugas harus lebih tegas dalam menjalankan tupoksinya, Fasilitas masih belum memadai.

G. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bab ini merupakan penutup dalam kajian penelitian. Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan hasil penelitian Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di kota Semarang

B. Implementasi kebijakan retribusi parkir kota Semarang apabila dilihat dari :

1. Ketepatan kebijakan

Menjalin hubungan dengan pihak swasta

Pemerintah mengalami kerugian sampai akhir tahun 2012 ,di tahun 2013 Pemerintah telah mengalami peningkatan realisasi pendapatan dengan angka yang tidak jauh berbedadi tahun 2013 artinya Pemerintah daerah telah mengalami kemajuan dengan pengambilan keputusan untuk tidak melibatkan pihak swasta.Namun di sayangkan angka realisasi ditahun 2013 dan 2014 yang tidak jauh berbeda berbanding terbalik dengan kalkulasi presentasenya diakibatkan penurunan target realisasi pendapatan sebanyak 36,7 %

2.Ketepatan pelaksanaan

Ada tiga poin di aturan struktur dan bagan organisasi di poin ke empat dan lima ,enam serta sebelas yang masih belum dilaksanakan dengan baik yaitu,dengan kenaikan titik parkir realisasinya pun kurang dari 50 %,sarana untuk parkir yang masih kurang seperti rompi untuk juru parkir dan sepeda motor dinas dan mengganti pemberlakuan karcis dengan sitem setoran kepada juru parkir.

3. Ketepatan target

Target retribusi parkir merupakan realisasi pendapatan dan itu tercermin dari titik

parkir.Sayang target realisasi titik parkir belum memenuhi bahkan tidak mencapai separuhnya

4. Ketepatan lingkungan

Lingkungan Endogen baik ditandai dengan rutinnya diselenggarakan rakor pusat yang membahas pembaharuan data , laporan dan pemecahan permasalahan retribusi parkir.Lingkungan Eksogen kurang baik masih banyak masyarakat yang mengeluh karena adanya banyak titik dan juru parkir liar dimana mereka ada yang memungut diluar tarif dan pelayanan yang buruk.

5.Ketepatan proses

Dari tahapan yang ada seperti Pelelangan dan kemudian kerjasama dengan pihak ketiga ,terkendala dengan aturan samsat berlangganan yaitu dengan UU LLAJ no 22 tahun 2009 dan Perda no 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum,yang selanjutnya di kelola langsung oleh DISHUB.

C. Implementasi kebijakan retribusi Parkir di Kota Semarang Faktor Pendukung Implementasi Retribusi Parkir

1. Tujuan retribusi parkir membuat pelaksana memiliki batasan mengenai apa yang harus

dilaksanakan dan apa yang tidak perlu dilakukan. Dengan adanya tujuan dan sasaran menjadikan fokus yang berkaitan dengan intensitas kegiatan yang dilakukan.

2. Komunikasi

1. Transmisi Pemahaman oleh pelaksana retribusi parkir (PNS) sudah baik.

2. Kejelasan, hierarki dan sistem yang baik mengantarkan pelaksana kebijakan baik dari bawah ke atas, atau atas ke bawah sudah baik namun ada bagian dari komunikasi yang menghambat yaitu

3. Konsistensi

Namun dari kesempurnaan komunikasi terdapat kesenjangan antara pelaksana kebijakan antara pelaksana parkir PNS dan Non-PNS, sehingga komunikasi terhalang

D. Implementasi kebijakan retribusi Parkir di Kota Semarang Faktor Pendukung Implementasi Retribusi Parkir

1. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia, Kurangnya staff yang mengkoordinir dan mengontrol pelaksanaan retribusi. Selain kurangnya staff yang menangani. Faktor yang

mempengaruhi berikutnya adalah pendidikan dan kualitas juru parkir serta perekrutan yang dinilai kurang melalui penjangkauan, dan sulitnya penerapan sanksi bagi oknum-oknum dibalik layar.

2. Finansial

Kesediaan staff untuk bekerja di lapangan tanpa tambahan biaya, namun dengan keterbatasan tersebut kinerja di lapangan kurang baik, dimana sering terabaikannya titik – titik untuk diawasi. Penyetoran uang parkir sudah sesuai dengan yang dituliskan di perda.

3. Fasilitas

Fasilitas untuk menunjang dengan baik terlaksananya kebijakan retribusi parkir yang baik masih terkendala di rompi parkir bagi juru parkir, kendaraan dinas serta lahan parkir yang belum memadai.

H. SARAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti memberikan beberapa rekomendasi yang dilihat dari hambatan Implementasi Retribusi Parkir antara lain

1. Tujuan retribusi parkir

1.Pemkot untuk dapat kiranya membuat kerjasama dalam penanganan peningkatan PAD dan ketertiban parkir di Kota Semarang dengan MUSPIDA yang terbentuk dlm SK dan atau MOU.

2.PERDA LLAJ segera terbentuk, sehingga kewenangan Dishubkominfo lebih luas,berkaitan dengan keterbatasan dalam menjalankan sanksi dan kewenangan mengenai lahan parkir yang bertabrakan dengan PERDA LLAJ.

3.Denda Tilang untuk pengendara dan jukir agar ditingkatkan sehingga ada efek jera,untuk menertibkan kesemrawutan lalu lintas

2.Sumber Daya

1.Sumber Daya Manusia,Menambah jumlah staff di bidang perparkiran Dinas Pehubungan,Komunikasi dan Informasi.Kurangnya pegawai yang memantau langsung pelaksanaan

kebijakan,menjadikan implementasi tidak berjalan dengan apa yang sudah direncanakan.

2.Finansial

Dibuat mengenai anggaran khusus untuk pelaksana tugas lapangan yang bertugas mengawasi dan mengontrol titik parkir.

3.Fasilitas

Menambah sarana dan prasarana untuk menunjang peningkatan PAD dan ketertiban, pengawasan dan pengendalian perparkiran di kota Semarang.Seperti sepeda motor dinas parkir rambu yang dinilai kurang untuk menunjang kinerja.

3.Komunikasi

1.Konsistensi

Perlunya sosialisasi kembali untuk para juru parkir secara formal,yaitu pertemuan dalam forum.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta : Bandung
- Bernadine R. Wirjana, M.S.W dan Prof. Dr. Susilo Supardo. 2006. *Kepemimpinan, Dasar Dasar dan Pengembangannya* :CV. Andi offset. Yogyakarta
- Creswell, John .2010. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Daniel H Mazmanian, dan Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*, New York: HarperCollins
- Edi Suharto .2005. *Analisis Kebijakan Publik . Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung :Alfabeta
- Faried Ali dan Syamsu Alam, 2011. *Teori Dan Konsep Administrasi*. Jakarta :PT.Grafindo
- Harbani Pasolong, 2012, *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Bandung : Alfabeta
- Joko Widodo. 2007. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang: Banyumedia
- Kaho, Josef Riwu. 1997 .*Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Fak Sospol - UGM
- Moleong, Lexy, Prof. Dr., MA. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Markus Max's Enembe, 2006. *Studi Implementasi Peraturan Daerah Nomer 1 tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Semarang (Studi Kasus Di Kawasan Simpang Lima)*. Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Semarang : Universitas Diponegoro
- Subarsono. 2006. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta : Bandung
- Syukur Abdullah, 1987. *Kumpulan Makalah Study Implementasi Latar Belakang*

Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan, Persadi :
Ujung Pandang

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Penerbit AIPI
Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad

Van Meter & Van Horn, 1995, *The Policy Implementation Process : A Conceptual
Framework in Administration and Society*, Vol. 6 No.4.

Peraturan Daerah Kota Semarang No.1 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan dan
Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum

Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
Undang-Undang No 34 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah

Teori-Teori Administrasi Publik . (2010). Dalam <http://eprints.undip.ac.id/5204/>.
Diunduh pada 20 Oktober 2012 pukul 9:46 WIB